

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ali, Achmad, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Apeldoorn, L. J. Van, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan UU NO. 8 TAHUN 1981: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak pidana korupsi*, Sinar Harapan Offset, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2015, *Buku Materi Pokok HKUM4406/4SKS/MODUL: Hukum Acara Pidana*, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

- Kelsen, Hans, 2018, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- M.D., Mahfud, 2008, *Hukum, Moral dan Politik*, Bahan Matrikulasi PDIH UNDIP, Semarang.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberti Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa, Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyanto, A.T. Sugeng, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 1970, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.

- _____, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2004, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafitri, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soemarjono, Maria, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugianto, Fajar, 2013, *Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, M., “Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No.3, Juli 2010.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, 2013, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Wiyono, R, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

- Akbar, Muhammad Fatahillah, “Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak pidana korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2, Juni 2016.
- Anggraeni, Ricca, “Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi (Kajian Putusan Nomor 207/Pid.B/2008/PN.MPW)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. IV, No. 3, Desember 2011.
- Christianto, Hwian, “Pembaharuan Makna Asas Legalitas”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-39, No. 3, September 2009.
- _____, “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, Oktober 2011.
- Juanda, H. Enju, “Hukum Dan Kekuasaan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Jusitisi*, Vol. 5, No. 2, September 2017.
- Mujahidin, A.M., “Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XXII, No. 257, April 2007.
- Rahardjo, Satjipto, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, April 2005.
- _____, “Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 4, No. 1, April 2008.
- Sabon, Max Boli, “Teori Hukum Progresif”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, No. 4, Oktober 2013.
- Sarmadi, A. Sukris, “Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Porgresif”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.
- Susanto, Sri Nur Hari, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 2, April 2014.
- Swardhana, Gde Made, “Pergulatan Hukum Posivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 4, Desember 2010.
- Tuegeh, Yolanda Graciella Vemmy, “Kedudukan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 7, Juli 2019.

C. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Efriza, 2017, Analisis Dasar Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. ARTIKEL DALAM BUKU

Reksodiputro, Mardjono, “Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan”, dalam Rahayu, Sri, *et al.*, 2008, *Butir-Butir Pemikiran Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung.

E. ARTIKEL KORAN

Jawahir Thontowi, “Pendekatan Hukum Inklusif dalam Penanganan Kasus Korupsi”, *Harian Seputar Indonesia*, 23 Januari 2019.

F. ARTIKEL INTERNET

FATF, “Laundering The Proceeds of Corruption”, <https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf>, diakses 10 Oktober 2020.

KPK, “Akil Mochtar Kasak-Kusuk Sang Hakim”, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/akil-mochtar-kasak-kusuk-sang-hakim>, diakses 18 Oktober 2020.

—, “M. Akil Mochtar“, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/29-akil-mochtar>, diakses 17 Oktober 2020.

—, “Sekilas KPK”, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, diakses 28 Januari 2021.

PPATK, “Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme”, <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1599113342.pdf>, diakses 10 Oktober 2020.

G. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

H. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011, perihal Peninjauan Kembali perkara Prita Mulyasari, 17 September 2012.

Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst., perihal perkara korupsi atas dana terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, 9 Desember 2013.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST., perihal perkara korupsi atas nama terdakwa M. Akil Mochtar, 30 Juni 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Februari 2015.